

LANGKAH STRATEGIS DINAS SOSIAL DALAM RANGKA MENEKAN ANGKA PMKS DI KAB.LOMBOK TIMUR (Silaturahmi Komisi VIII DPR.RI dengan Dinsos Lotim Kamis, 21 Juli 2022) Ka.Dinsos Lotim : H. SUROTO,SKM.MKES



Bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh semua kabupaten / kota, dan Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk memudahkan dalam pemberian pelayanan Bidang Sosial dalam rangka mempercepat penurunan angka PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti fakir miskin, anak terlantar, anak difabel dan penyandang disabilitas sosial lain. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan berbagai prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional, tetapi masih banyak masalah dan tantangan dalam mewujudkan visi misi daerah, terutama dalam hal capaian IPM dan masih relatif tingginya angka kemiskinan yaitu 15,38 % dari jumlah penduduk lotim sekitar 1,3 juta jiwa lebih, dengan data lengkap sbb:



Pemda Lotim menetapkan target 100% dari jumlah sasaran pelayanan minimal terlayani, yang meliputi **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas diluar panti, anak terlantar diluar panti, lansia terlantar diluar panti, penyandang tuna sosial dan perlindungan jaminan sosial saat dan setelah bencana.** Beberapa kegiatan bidang sosial yang sudah dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2022 antara lain: Pendataan sasaran dan validasi data PMKS dengan data sementara sebagai berikut :

1. Jumlah disabilitas sekitar 1.810 orang yang sudah ada data BNBA dan baru sekitar 50 % mendapat bantuan / pelayanan sosial sesuai kemampuan daerah.
2. Jumlah yang masuk DTKS sekitar 770.000 orang dan angkanya dinamis setiap bulan karena ada yang meninggal dan ada yang lahir. Semuanya atau 100 % diusulkan untuk mendapatkan program pelayanan sosial dasar seperti JKN-BPJS.PBI pusat sekitar 660.000 orang (85%) dari jumlah DTKS, karena yang sekitar 209.000 orang sedang di non aktifkan dari pusat dengan berbagai sebab. Adapun sisanya yang belum masuk DTKS ditanggung APBD sekitar 60.000 orang yang membutuhkan anggaran daerah sekitar 28 Milyar setiap tahunnya.
3. Selain itu Pemda juga memfasilitasi pelayanan sosial bagi masyarakat miskin yang belum terakomodir dalam BPJS-PBI dengan SKTM untuk sekali pelayanan dan selanjutnya akan difasilitasi menjadi peserta BPJS-PBI yang APBN atau bisa juga yang APBD.
4. Keluarga yang masuk DTKS juga diusulkan ke pusat untuk mendapat program lain seperti PKH, Kartu Indonesia Pintar KIP dan Program Bansos lainnya. Program dan kegiatan untuk santri dan anak kurang mampu lainnya yaitu : Seribu Tahfiz setiap tahun sudah menjangkau lebih 4000 santri di pondok pesantren yang menyelenggarakan program tahfiz punya asrama punya LKSA dengan jangkauan sekitar 80 Pondok Pesantren dan akan terus berkembang.

MASALAH LAIN YANG SEDANG DI HADAPI DI BIDANG SOSIAL

1. Belum ada data riil PMKS by name by adres yang valid di semua desa / kelurahan.
2. Banyak yang belum memahami istilah PMKS.
3. Capaian SPM Sosial masih sangat rendah.
4. Sumber Daya pendukung pelayanan bidang sosial terbatas (tenaga, sarana dan anggaran untuk melaksanakan SPM).
5. KPM khususnya JKN BPJS PBI banyak yang di non aktifkan pusat dari september 2021 s/d Juni 2022 (209.000 org).

RENCANA TINDAK LANJUT YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN SUMBER DAYA BAIK DARI KABUPATEN, PROVINSI NTB DAN PUSAT/KEMENSOS.

1. **Belum ada data riil PMKS by name by adres yang valid di semua desa / kelurahan.**
 - **Edaran Bupati untuk validasi data PMKS / pendataan ulang.**
 - **Pengelolaan data PMKS di Desa, Kec dan Kab.**
 - **Data PMKS / DTKS diumumkan di desa.**
2. **Banyak yang belum memahami istilah PMKS → sosialisasi dengan berbagai media cetak dan medsos lain/**
3. **Capaian SPM Sosial masih sangat rendah.**
 - **Pengumpulan dan pengelolaan data sasaran SPM.**
 - **Penghitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan SPM**
 - **Perencanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan SPM**
 - **Pelaksanaan pemenuhan pelayanan SPM dengan target semua jenis pelayanan SPM 100% dari jumlah sasaran, yang meliputi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, penyandang tuna sosial dan perlindungan jaminan sosial saat dan setelah bencana. → Evaluasi capaian SPM berkala.**
4. **Sumber Daya pendukung pelayanan bidang sosial terbatas (tenaga, sarana dan anggaran).**
 - **Invetarisasi sumber daya bidang sosial dihubungkan dengan beban kerja dan jenis pelayanan sosial yang harus di laksanakan mll TELAAHAN STAF.**
 - **Advokasi anggaran kepada TAPD, Swasta, BUMD, BUMN, Baznas dll untuk mendukung pelayanan sosial.**
5. **KPM khususnya JKN BPJS PBI banyak yang di non aktifkan pusat dari september 2021 s/d Juni 2022 (209.000 org). → Dinsos memfasilitasi pengaktifan BPJS PBI dan memasukkan dalam data DTKS di semua desa.**

Selanjutnya untuk memudahkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah di susun beberapa program dan kegiatan termsuk target kinerja dan kebutuhan anggaran sebagaimana telah termuat alam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- **Program pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya dengan target PMKS yang mendapat pelayanan 57% th 2023.**
- **Program pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan target 40 % PMKS terehabilitasi th 2023.**
- **Program Pembinaan anak terlantar 40% th 2023.**

- Prog Pembinaan para penyandang cacat / trauma 40 % th2023
- Program Pembinaan PA / Panti Jompo (LKSA) 40%
- Pembinaan eks penyandang narkoba dll 60%
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos 60%
- Program Pendamping PKH 100% terfasilitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan → Program dan kegiatan untuk menekan angka PMKS di Lombok Timur sudah sedang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada di daerah. Sampai dengan tahun 2022 masih banyak PMKS yang belum mendapat pelayanan maksimal terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Lotim (15,38%) dan masih banyak penerima BPJSPBI yang di non aktifkan dengan berbagai sebab.
2. Usul dan RTL → Segera melakukan validasi dan pendataan ulang sasaran PMKS by name by adres untuk memudahkan perencanaan pelayanan bidang sosial, dan memohon dukungan sumber daya bidang sosial yang memadai kepada TAPD . Selanjutnya Dinsos membuat tim SPM dan membuat edaran bupati untuk percepatan penurunan angka PMKS di Kabupaten Lombok Timur.
3. Mohon dukungan dari DPR.RI Komisi VIII untuk mengusulkan kepada Kemensos RI agar dapat memprogramkan DAK Non Fisik Bidang Sosial untuk percepatan pencapaian SPM Bidang Sosial di kabupaten / kota, seperti DAK Non Fisik yang sudah ada di bidang pelayanan dasar urusan wajib yang lain seperti di bidang Kb-Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Anak dll.

===== majubersamadinsoslotim=====